

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dianut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis global, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disadari bahwa mewujudkan otonomi daerah terdapat faktor yang sangat penting dan strategis adalah dukungan kemampuan keuangan daerah itu sendiri, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Semakin besar jumlah uang atau biaya yang tersedia, maka akan semakin besar pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di daerah, pemerintah kabupaten/kota tentunya membutuhkan sejumlah dana untuk membiayai berbagai aktivitas tersebut. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan.

Untuk mendukung pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, setiap daerah harus mampu menggali dan mendayagunakan sumber-sumber keuangan asli daerah, disamping dana transfer keuangan dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus atau yang dikenal dengan dana perimbangan

Sumber –sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bab XI bagian kelima pasal 285 ayat 1 terdiri dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

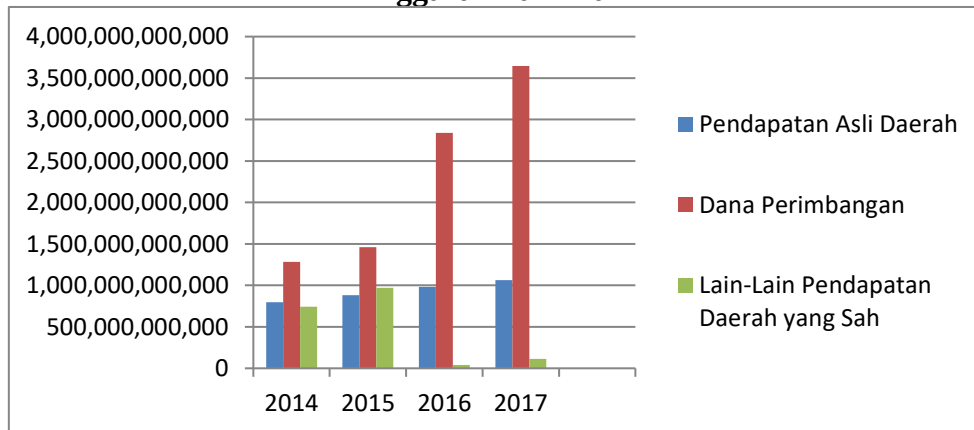
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya harus ditingkatkan mengingat tuntutan dan beban pembangunan tiap tahun terus meningkat. Upaya pengembangan atau peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat ditempuh dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi dimana intensifikasi merupakan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan tidak menambah sumber baru atau dengan kata lain bagaimana caranya mengelola sumber-sumber yang sudah ada menjadi sumber penerimaan yang lebih baik. Sedangkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan cara ekstensifikasi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan dengan menambah sumber-sumber penerimaan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Provinsi NTT merupakan salah satu provinsi dimana kabupaten dan kotanya memiliki potensi daerah pada bidang atau sektor pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, dan jasa-jasa lainnya yang mana dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunannya membutuhkan dana yang begitu besar. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan meningkatkan efektivitas sumber-sumber pendapatan yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. penerimaan pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 4 tahun terakhir dapat

dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini.

Gambar 1.1
Realisasi Penerimaan Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
Anggaran 2014-2017



Sumber :Badan Pendapatan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa selama 4 tahun terakhir penerimaan pendapatan terbesar berasal dari dana perimbangan yang dimana dana tersebut berasal dari dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005). dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. (Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 33 Tahun 2004). Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena kemampuan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengolah potensi sumber

daya yang dimiliki masih tergolong sangat rendah sehingga kinerja mereka pelayanan kepada masyarakat masih belum dikatakan memuaskan.

Dengan adanya jumlah dana perimbangan yang lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah menyebabkan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat sangat besar Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa penerimaan PAD digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana daerah baik berupa public goods maupun public regulation, yang selanjutnya akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin besar kesejahteraan masyarakat semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban masyarakat membayar pajak daerah dan retribusi daerah, yang kembali berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan PAD dan seterusnya Dengan PAD yang besar maka kapasitas fiskal daerah semakin besar dan semakin besar pula kemampuan daerah untuk membiayai seluruh belanja daerah tanpa harus menunggu bantuan Pemerintah Pusat, sehingga proses percepatan pembangunan, penyediaan

fasilitas pelayanan publik dapat terlaksana dengan cepat.

sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah terbesar yaitu berasal dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain PAD Yang Sah. sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut, merupakan sumber penerimaan yang potensial di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari data hasil survey awal yang penulis lakukan terhadap sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah, diperoleh gambaran sumber tentang besarnya Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Target & Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2014-2017 (Dalam Jutaan Rupiah)

No	PAD	Tahun							
		2014		2015		2016		2017	
		Target Rp	Realisasi Rp	Target Rp	Realisasi Rp	Target Rp	Realisasi Rp	Target Rp	Realisasi Rp
1	Pajak Daerah	548.875	536.573	658.726	662.667	729.670	745.442	781.961	814.227
2	Retribusi Daerah	26.410	18.314	38.278	32.888	45.769	40.412	25.210	24.258
3	Hasil Kekayaan Daerah	63.445	63.445	71.575	71.557	77.639	77.139	67.590	67.208
4	Lain-Lain PAD yang Sah	96.073	178.318	103.966	115.202	150.332	120.542	141.254	156.064
Total		734.805	796.651	872.546	882.315	1.003.4	983.537	1.016.0	1.061.7

Sumber : Badan Pendapatan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan Target dan Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2014-2017 yang disajikan pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama empat (4) tahun terakhir dan nilai nominal penerimaan Pendapatan Asli Daerah berfluktuasi dengan kecenderungan menaik, namun kenaikan yang tidak signifikan. Hal ini menunjukkan belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dalam melakukan/merealisasikan penerimaan sumber-sumber penerimaan daerah yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap PAD. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya yang lebih optimal dalam merealisasikan penerimaan PAD yang dimiliki. Selanjutnya apabila diamati lebih dalam tabel diatas tersebut telah diketahui bahwa penerimaan retribusi daerah selama 4 tahun terakhir juga mengalami fluktuasi bahkan penerimaan retribusi dari tahun ke tahun tidak mencapai target yang ditetapkan, walaupun jumlah realisasi selalu mengalami peningkatan akan tetapi hal tersebut masih belum bisa menyaingi penerimaan pendapatan asli daerah dari sumber yang lain. Untuk mengetahui sejauh mana penetapan target dan realisasi penerimaan retribusi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah Provinsi Tenggara Timur Tahun
Anggaran 2014-2017

Tahun Anggaran	Target Retribusi Daerah	Realisasi Retribusi Daerah	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2014	26.410.373.000	18.314.434.627	9.835.906.756	53,7
2015		32.888.198.526	14.573.763.899	79,5
2016	38.278.885.000	40.412.227.792	7.524.029.266	22,8
2017	45.769.704.000 25.210.577.000	24.258.995.631	-16.153.232.161	-39,9

Sumber : Hasil Perhitungan

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa Perubahan realisasi retribusi daerah setiap tahun juga mempengaruhi besar kecilnya laju pertumbuhan penerimaan pendapatan suatu daerah. Semakin besar perubahan realisasi yang diberikan dari tahun sebelumnya, maka laju pertumbuhan yang terjadi besar pula. Demikian sebaliknya, semakin sedikit perubahan realisasi penerimaan dari tahun sebelumnya, laju pertumbuhan yang terjadi semakin kecil (Munir,dkk. 2005). Pada tahun 2014 realisasi retribusi daerah berjumlah Rp. 18.314.434.627 dengan laju pertumbuhan sebesar 53,7% dan pada tahun 2015 realisasi retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 32.888.198.526 dengan laju pertumbuhan sebesar 79,5% bahkan pada tahun 2016 realisasi retribusi daerah semakin meningkat dengan jumlah sebesar Rp 40.412.227.792 dengan laju pertumbuhan sebesar 22,8% akan tetapi pada tahun 2017 jumlah realisasi retribusi daerah mengalami penurunan sebesar Rp 24.258.995.631 dengan laju pertumbuhan sebesar -39,9% hal ini tentu saja membuktikan bahwa pengelolaan retribusi daerah masih sangatlah rendah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, muncul pertanyaan mengapa realisasi penerimaan retribusi daerah selama 4 tahun terakhir tidak mencapai target dan pertumbuhan penerimaan retribusi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangatlah kecil ? atau dengan kata lain seberapa besar potensi penerimaan retribusi daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jenis retribusi daerah manakah yang dapat berpotensi untuk dikembangkan ? pertanyaan inilah yang memotivasi penulis untuk mencermati dan mengkaji lebih jauh dalam penelitian ini dengan judul **“Analisis Potensi Retribusi Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur”**

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Potensi Retribusi Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur ?
2. Apakah Terdapat Jenis Retribusi Daerah yang memiliki potensi dan dapat dikembangkan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Potensi Retribusi Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Untuk Menganalisis Jenis Retribusi Daerah yang memiliki potensi dan dapat dikembangkan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Lembaga Pendidikan, khususnya untuk Universitas, lebih khusus lagi untuk Mahasiswa Fakultas Ekonomi
2. Sebagai bahan acuan referensi bagi Peneliti lain, atau bagi rekan-rekan Mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lanjutan sejenis